

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa kawasan permukiman ialah bagian dari area lingkungan hidup di luar kawasan perkotaan ataupun perdesaan, yang berperan sebagai kawasan tempat tinggal ataupun kawasan hunian serta tempat aktifitas yang menunjang perikehidupan serta penghidupan. Permukiman merupakan bagian dari kawasan hunian yang terdiri dari lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, fasilitas, utilitas universal, dan mempunyai penunjang aktifitas peranan lain di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Satuan lingkungan permukiman ialah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, sarana dan prasarana lingkungan yang terstruktur.

Kota ialah daerah penumpukan penduduk dimana sistem jaringan kehidupan manusia serta tingkatan sosial ekonomi yang heterogen dengan warna materialistik yang mewarnainya terbentuk. (Mayasari, 2012). Aktifitas utama dari kawasan kota bukan pertanian melainkan lahan yang ada berperan selaku kawasan permukiman, pemusatan serta penyebaran pelayanan jasa, pemerintah, pelayanansosial, serta aktifitas ekonomi.

Daerah perkotaan akan semakin padat oleh bangunan permukiman dengan berbagai permasalahan yang timbul. Permukiman termasuk dalam masalah kependudukan yang sering menjadi bahan pembicaraan di daerah perkotaan (Mayasari, 2012). Salah satu masalah permukiman yaitu hunian liar atau daerah permukiman kumuh yang berkembang di berbagai kota yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang dapat menurunkan kualitas permukiman nantinya. Berkembangnya permukiman yang tidak terkendali, khususnya di daerah ibukota kabupaten banyak disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Munculnya sumber dan penyebaran penyakit menjadi dampak dari tidak terpenuhinya syarat kesehatan yang baik dalam segi pembangunan ataupun

fasilitas kesehatan kawasan permukiman padat penduduk dan permukiman kumuh.

Kabupaten Bogor adalah salah satu daerah yang berdekatan langsung dengan DKI Jakarta yang merupakan pusat ekonomi, perdagangan dan pemerintahan. Kabupaten Bogor adalah salah satu wilayah penyangga (*hinterland*) yang potensial menjadi daerah yang mempunyai efek penyebaran (*spread effect*) pembangunan bagi pertumbuhan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor. Sehingga banyaknya permukiman yang berada di Kabupaten Bogor khususnya Kecamatan Cibinong.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 yaitu Kabupaten Bogor termasuk pada wilayah perkotaan Bodebekpunjur sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jawa Barat dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di kawasan strategis nasional (KSN) Jabodetabekpunjur, penetapan kawasan Kecamatan Cibinong sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) perkotaan, dengan wilayah pelayanan Kabupaten dan beberapa Kecamatan, Kabupaten Bogor diarahkan menjadi kawasan penyangga dalam sistem pusat kegiatan nasional (PKN) kawasan perkotaan Jabodetabek untuk mengembangkan sektor industri ramah lingkungan, serta yang menjadi pusat kawasan industri di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Cibinong. (Anggraeni, 2016)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 – 2036 menetapkan Kecamatan Cibinong menjadi pusat kegiatan wilayah provinsi (PKWp), wilayah pengembangan tengah salah satunya termasuk satuan wilayah pengembangan (SWP) Cibinong yang didalamnya meliputi Kecamatan Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Bojonggede, Babakanmadang, dan Kecamatan Tajurhalang. Kecamatan Cibinong mempunyai aksesibilitas yang tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi. (Laesari, 2019)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Cibinong Raya yaitu didalamnya dijelaskan bahwa bagian wilayah perkotaan (BWP) Cibinong yang akan berfungsi sebagai pusat pengembangan Kabupaten Bogor tentunya akan memiliki keberfungsian sebagai pelayanan bagi wilayah disekitarnya. Sebagai ibukota kabupaten, tentu saja diharapkan peranan bagian wilayah perkotaan (BWP) Cibinong dalam konstelasi sistem pusat di Indonesia di masa mendatang dapat berperan setara dengan ibukota- ibukota kabupaten lainnya yaitu setingkat Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi (PKWp).

Kecamatan Cibinong dengan luas wilayah sekitar 43.36 km² dan menjadi ibukota Kabupaten Bogor. Kecamatan Cibinong memiliki 12 Kelurahan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk. Menurut BPS Kab. Bogor pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018, Kecamatan Cibinong mengalami pertumbuhan penduduk pada setiap Kelurahan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kecamatan Cibinong yaitu 320.151 jiwa, dan pada tahun 2017 yaitu berjumlah 427.014 jiwa, dan pada tahun 2018 berjumlah 447.052 jiwa.

Berdasarkan perbandingan tiga tahun terakhir, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Cibinong bertambah dan menjadikan Kecamatan Cibinong menjadi padat penduduk. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Cibinong menjadi wilayah mobilitas para penglaju yang bekerja di ibu kota dan daerah penunjang Kabupaten Bogor, sehingga banyak dari para penglaju dan pekerja tersebut yang memutuskan untuk tinggal dan membangun rumah di Kecamatan Cibinong.

Selain itu Kecamatan Cibinong menjadi pusat kegiatan wilayah provinsi (PKWp) serta Kecamatan Cibinong memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap angkutan umum massal, sehingga bertambahnya penduduk dan kawasan permukiman di Kecamatan Cibinong pun meningkat. Peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, menurut rekapitulasi data BPS Kabupaten Bogor pada tahun 2018 penduduk Cibinong berjumlah 447.052 jiwa dengan luas 43,36 km² dengan kepadatan penduduk 10.310,24 jiwa per km². Dengan demikian dapat menjadikan kecamatan Cibinong rentan terhadap

permukiman kumuh juga berkualitas kurang baik akibat dari kepadatan penduduk yang tinggi dan penggunaan lahan yang didominasi permukiman.

Maka dari itu dibutuhkan metode yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemanfaatan data penginderaan jauh dengan sistem informasi geografis menjadi salah satu teknik yang populer dalam menentukan kualitas permukiman. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Tingkat Kualitas Lingkungan Permukiman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada untuk dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Sulit melakukan identifikasi kualitas bangunan disebabkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan
2. Pertumbuhan bangunan yang cepat dapat memicu menurunnya kualitas lingkungan kawasan permukiman
3. Diperlukannya teknologi yang mampu memonitor kualitas permukiman dengan baik dan akurat

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu pembatasan pada ruang lingkup penelitian, seperti berikut ini:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada indikator-indikator fisik lingkungan permukiman.
2. Bangunan permukiman yang bertambah padat menjadikan menurunnya kondisi kualitas lingkungan permukiman.

D. Perumusan Masalah

Bagaimana tingkat kualitas permukiman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan interpretasi citra penginderaan jauh?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan informasi dalam menganalisis kualitas lingkungan permukiman menggunakan penginderaan jauh.
 - b. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian serupa berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan keseimbangan lingkungan permukiman.
 - b. Bagi pemerintah atau instansi terkait yang mengelola dan pemangku kebijakan dapat memberikan rujukan untuk penataan lingkungan permukiman supaya sesuai dengan rencana tata ruang dalam perencanaan pembangunan daerah terkait lingkungan permukiman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
 - c. Bagi Pendidikan dapat menjadi bahan ajar mata pelajaran geografi dalam menginterpretasi peta dan citra penginderaan jauh sesuai konsep, prinsip, dan pendekatan geografi pada tingkat SMA dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa geografi dalam mata kuliah penginderaan jauh dan SIG.